

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2016**



**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2016

**Kepala Dinas Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Ir. Nazalyus, M. Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590824 198603 1 009

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), yang memuat informasi penting dan relevan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah kepada masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan 2017 secara bertahap bermaksud untuk **mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan**, hal tersebut sesuai dengan visi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 sampai dengan 2017 .

Guna mewujudkan visi (cita-cita) dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia
- Misi 2 : Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan
- Misi 3 : Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hut dan konservasi sumber daya alam
- Misi 4 : Meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hut dan lahan serta reklamasi hutan
- Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

### **Misi 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang professional .**

Misi 1 ini diuraikan dengan satu sasaran :

Peningkatan kemampuan/kapasitas para penyelenggara pembangunan kehutanan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

### **Misi 2. Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan**

Misi 2 diuraikan dengan tiga sasaran :

**Sasaran 1.** Terselenggaranya penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

**Sasaran 2.** Terbentuknya wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit – unit (terkecil) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit terkecil yang dimaksud adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik pada hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi.

**Sasaran 3.** Tersediaanya data dan informasi potensi sumber daya hutan lingkup Provinsi.

**Misi 3. Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam.**

Misi 3 diuraikan dengan dua sasaran :

**Sasaran 1.** Terselenggaranya upaya – upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal serta terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan.

**Sasaran 2.** Terkumpulnya data potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang potensial dikembangkan untuk mendukung pariwisata sektor kehutanan dan terjalinnya kerjasama usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan.

**Misi 4. Meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan.**

Misi 4 ini diuraikan dengan dua sasaran :

**Sasaran 1.** Terlaksananya kegiatan reboisasi (di dalam kawasan hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan).

**Sasaran 2.** Termonitornya reklamasi lahan bekas tambang dalam kawasan hutan.

**Misi 5. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).**

Misi 5 ini diuraikan dengan tiga sasaran :

**Sasaran 1.** Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang perizinan usaha pada hutan produksi dan hutan lindung baik hutan alam maupun hutan tanaman lintas Kabupaten/Kota.

**Sasaran 2.** Optimalnya pendapatan negara bukan pajak dan terciptanya tertib administrasi peredaran hasil hutan melalui pengumpulan data potensi dan pilihan pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu.

**Sasaran 3.** Terlaksananya pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Mengacu pada misidimaksud, makaterdapat beberapaprioritassasaranyang ingin dicapai pada tahun 2016yaitu :

- a. Tersosialisasinya pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- b. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Tanaman Industri (HTI);

- c. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- d. Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan;
- e. Terpromosinya / dikenalnya produk-produk unggul dari kehutanan;
- f. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan;
- g. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan;
- h. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat;
- i. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- j. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal;
- k. Berkembangnya konservasi sumberdaya alam dan pemanfaatan jasa lingkungan serta wisata alam berbasis masyarakat;
- l. Pengembangan perhutanan sosial;
- m. Terjaminnya kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal;
- n. Terbentuknya kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan terlaksananya operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- o. Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan Kawasan Hutan (KH);
- p. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi;
- q. Terwujudnya penggunaan Kawasan Hutan (KH) sesuai fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku;
- r. Teroperasinya peralatan GIS untuk penyediaan data dan peta kehutanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- s. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini;
- t. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM kehutanan dalam hal pengelolaan data peta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 5 (lima) program utama dengan 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp. 18.949.279.071,-. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan tersebut, menunjukkan pencapaian kinerja terhadap 11 sasaran, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian **Sasaran - 1** yaitu meningkatnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang profesional.

Untuk pencapaian **Sasaran - 2** yaitu terselenggaranya penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Pencapaian **Sasaran - 3** yaitu terbentuknya wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit – unit (terkecil) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah – wilayah pengelolaan kawasan hutan dalam unit terkecil yang dimaksud adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik pada hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi.

Pencapaian **Sasaran - 4** yaitu Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya hutan lingkup Provinsi.

Pencapaian **Sasaran - 5** yaitu terselenggaranya upaya – upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal serta terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan.

Pencapaian **Sasaran - 6** yaitu terkumpulnya data potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang potensial dikembangkan untuk mendukung pariwisata sektor kehutanan dan terjalannya kerjasama usaha pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan.

Pencapaian **Sasaran - 7** yaitu terlaksananya kegiatan reboisasi (di dalam kawasan hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan).

Pencapaian **Sasaran - 8** yaitu termonitornya reklamasi lahan bekas tambang dalam kawasan hutan.

Pencapaian **Sasaran - 9** yaitu Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang perizinan usaha pada hutan produksi dan hutan lindung baik hutan alam maupun hutan tanaman lintas kabupaten/kota.

Pencapaian **Sasaran - 10** yaitu optimalnya pendapatan negara bukan pajak dan terciptanya tertib administrasi peredaran hasil hutan melalui pengumpulan data potensi dan pilihan pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu.

Pencapaian **Sasaran - 11** yaitu terlaksananya pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain : masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan, utamanya dalam hal penggunaan lahan hutan secara liar tanpa perijinan yang dijadikan tambang timah inkonvensional oleh masyarakat awam maupun pihak swasta. Karena minimnya kesadaran

masyarakat tentang antisipasi dampak dari penggunaan lahan hutan secara liar tersebut, sehingga penebangan hutan dilakukan tanpa ada perijinan dari pihak-pihak yang terkait.

Adapun langkah - langkah untuk mengatasi masalah dimaksud, diantaranya adalah melakukan penyuluhan sistem penanaman kembali (Reboisasi) untuk rehabilitasi hutan dan lahan pasca tambang, penyuluhan tentang penggunaan kawasan hutan (KH) sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku, penyuluhan tentang pengelolaan sumber daya hutan, penyuluhan tentang pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung. Pemberian bibit tanaman pohon untuk perubahan iklim dan bimbingan teknis penanaman secara organik untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

## DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Bab I    Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	1
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan.....	2
1.3.2. Sumber Daya Manusia dan Asset Dinas Kehutanan.....	5
1.3.3. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II   Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.....	8
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.1.1. Visi.....	9
2.1.2. Misi.....	10
2.2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan.....	10
2.2.1. Tujuan.....	11
2.2.2. Sasaran.....	12
2.2.3. Kebijakan Pembangunan.....	15
2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2016.....	17
2.4. Perjanjian Kinerja 2016.....	33
Bab III  Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016.....	35
3.1. pengukuran Pencapaian Sasaran.....	35
3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja.....	41
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	54
Bab IV  Penutup.....	56



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Dasar Kebijakan**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya. Peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom.

Dalam pelayanan di bidang Kehutanan berdasarkan Peraturan Perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing SKPD antara lain dirinci berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksi keadaan yang akan dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong bagi terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan, sedangkan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah Provinsi sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

### **1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Peraturan tersebut urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

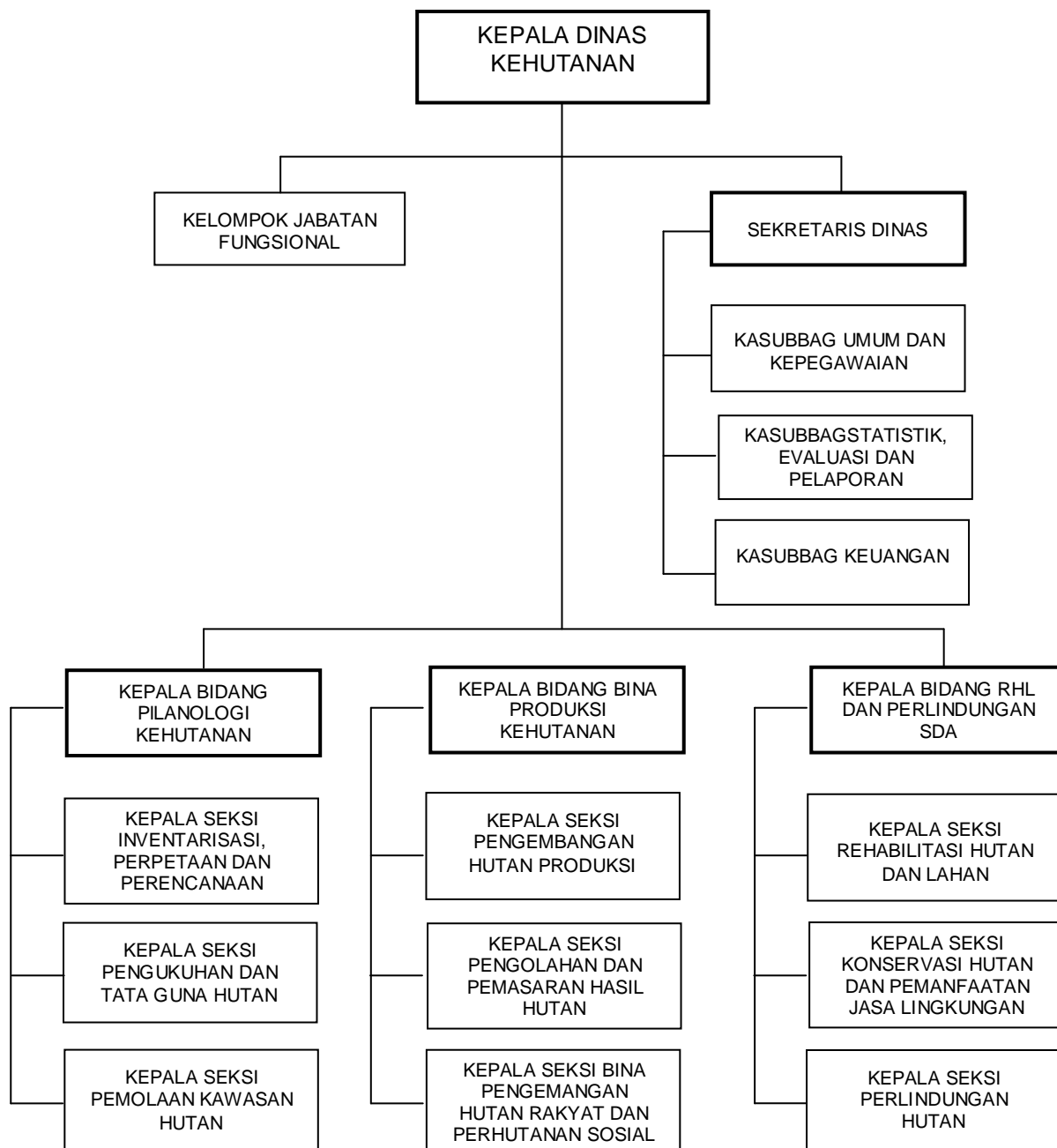
merupakan salah satu dinas yang termasuk dalam urusan pilihan tersebut.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membidangi pengelolaan kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan berbagai permasalahan dan penyelesaiannya.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi sebagai penyelenggara kehutanan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) Kepala Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIa;
- b. Sekretaris, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Statistik, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kepala Bidang Planologi Kehutanan, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
  - Seksi Inventarisasi, Perpetaan dan Perencanaan
  - Seksi Pengukuhan dan Tata Guna Hutan
  - Seksi Pemolaan Kawasan Hutan
- d. Kepala Bidang Produksi Kehutanan, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
  - Seksi Pengembangan Hutan Produksi
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
  - Seksi Bina Pengembangan Hutan Rakyat dan Perhutanan Sosial
- e. Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Perlindungan Sumber Daya Alam, setara dengan jabatan eselon IIIa, membawahi :
  - Seksi Konservasi Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
  - Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - Seksi Perlindungan Hutan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dibawah ini adalah struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:



### 1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Aset SKPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 76 pegawai, dengan status kepegawaian 54 PNS, 12 orang tenaga honorer dan 10 orang tenaga honorer Pengaman Hutan. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 11 orang. Sedangkan honorer terdiri dari S1 sebanyak 4 orang dan SLTA sebanyak 18 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 12 orang.

Tabel 1.3.2.1  
Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	7	2	9
3	Sarjana / S1	21	12	33
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	2	3	5
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	7	6	13
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-

Tabel 1.3.2.2  
Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Berdasarkan Eseloning

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	1	-	1
	II B	-	-	-
	II C	-	-	-
	II D	-	-	-
2	III A	3	1	4
	III B	-	-	-
	III C	-	-	-
	III D	-	-	-
3	IV A	7	5	12
	IV B	-	-	-
	IV C	-	-	-
4	Non Eselon	21	15	35
5	Fungsional	6	1	8
	Jumlah	38	22	60

Dilihat dari tabel diatas bahwa pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlihat beragam dari segi golongan maupun pendidikan.

### **1.3.3 Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi gambaran umum Penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016

### **1.1 Latar Belakang**

Memuat uraian yang melatarbelakangi pentingnya penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.2 Dasar Hukum**

Memuat tentang Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah, PermenPANRB yang mengatur tentang kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan LAKIP SKPD.

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

Memuat gambaran umum organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyangkut tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

## **BAB II RENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

### **2.1 Visi dan Misi SKPD**

Uraian visi dan misi yang akan dicapai oleh SKPD dalam 5 tahun ke depan, sebagaimana termuat dalam rencana strategis SKPD.

Visi : kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir tahun perencanaan.

Misi : cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi.

### **2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan**

Tujuan : uraian operasional dari misi

Sasaran : uraian terukur dari tujuan

Kebijakan : upaya (melalui pelaksanaan program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

### 2.3 Rencana Kinerja SKPD

Memuat uraian yang menjelaskan korelasi antara pencapaian target sasaran strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Uraian ini berpijak dari tabel penetapan kinerja.

### 3.1 Pengukuran Kinerja

Memuat uraian yang menjelaskan tabel pengukuran kinerja tahunan, sekaligus mengkorelasikannya dengan tabel pengukuran program/kegiatan.

### 3.2 Analisis Kinerja

Memuat uraian yang menjelaskan tentang keberhasilan atau kegagalan SKPD dalam melaksanakan misi.

## BAB III PENUTUP

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

Pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu:

- a. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi;
- c. Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku;
- d. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat;
- e. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal;
- g. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan;
- i. Terlaksananya upaya reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan;
- j. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan HHBK;
- k. Terpromosinya produk – produk unggul dari kehutanan;
- l. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTI, HTR dan meningkatnya tertib administrasi peredaran dan iuran hasil hutan
- m. Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan (meningkatnya PNBP);
- n. Tersosialisasinya pengelolaan KPHP;
- o. Terbangunnya hutan adat.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kehutanan lestari, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis pada pengelolaan sumber daya hutan yang lestari. Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2016 telah menetapkan 5 program utama dengan 35 kegiatan.



Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2017 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2012 s.d tahun 2017.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2.1. Visi dan Misi**

### **2.1.1 Visi**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan”***.

Dengan mengacu pada Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Visi sebagai berikut: ***”Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan kehutanan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan”***.

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Perwujudan kondisi pembangunan kehutanan lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemantapan, perlindungan dan pembinaan produksi pada kawasan hutan beserta sumberdaya alam yang dikandungnya serta sumberdaya manusia penyelenggara pembangunan kehutanan di daerah yang profesional dan mampu bersama-sama dengan masyarakat dan parapihak untuk memberikan manfaat baik secara ekonomis, sosiologis maupun ekologis bagi kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam misi-misi, dimana

misi-misi tersebut secara umum merupakan tanggungjawab seluruh pihak/stakeholders.

### **2.1.2 Misi**

Guna mewujudkan visi (cita-cita) dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Misi 2 : Memantapkan keberadaan dan fungsi kawasan hutan.
- Misi 3 : Mendukung terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan dan konservasi sumber daya alam.
- Misi 4 : Meningkatkan upaya reboisasi, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan.
- Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

## **2.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan**

### **2.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai misi, penyelesaian permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, tujuan disusun untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM serta kelembagaan penyelenggara kehutanan yang profesional;
2. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan atas status, letak batas dan luas kawasan hutan;
3. Mewujudkan operasionalisasi kelembagaan KPH yang berkelanjutan;
4. Menciptakan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dalam rangka mendukung pemantapan kawasan hutan;
5. Meningkatkan pelayanan publik dengan menyediakan data dan informasi SDH yang akurat dan terkini;
6. Meningkatkan pelayanan publik dalam hal pengecekan kawasan hutan di lapangan dengan lebih efektif dan efisien;

7. Mewujudkan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku;
8. Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan;
9. Mengembangkan upaya konservasi hutan, SDA dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam;
10. Penurunan luas lahan kritis dan peningkatan daya dukung DAS;
11. Meningkatkan pemberdayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
12. Mempromosikan berbagai produk unggul dari kehutanan;
13. Meningkatkan pengembangan kawasan hutan produksi melalui pembangunan HTR dan HTI;
14. Meningkatkan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan;
15. Meningkatkan pengelolaan KPHP;
16. Pembangunan hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial.

### **2.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu dan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya kawasan hutan sehingga pengelolaan SDH dapat dilaksanakan secara optimal, dengan indikator sebagai berikut :
  - Orientasi batas kawasan hutan sebesar 10 % dari total panjang batas kawasan hutan
  - Rekonstruksi batas kawasan hutan sebesar 10 % dari total panjang batas kawasan hutan
  - Penetapan batas partisipatif pada areal pemanfaatan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Rakyat (HR)
2. Terbentuknya kelembagaan KPH dan terlaksananya operasionalisasi KPH, dengan indikator sebagai berikut:
  - Pembentukan kelembagaan untuk 6 KPHP
  - Operasionalisasi 6 KPHP
3. Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan kawasan hutan, dengan indikator sebagai berikut:
  - Data terkini pengukuhan dan kondisi batas kawasan

- Perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Provinsi
  - Penataan batasan kawasan hutan
  - Penunjukan kawasan hutan berikut petanya
  - Koordinasi dan perencanaan dalam rangka pemanfaatan RTRW
4. Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini, dengan indikator sebagai berikut:
    - Data dan informasi geospasial dan tematik kehutanan terkini tingkat provinsi
    - Data dan informasi sumber daya hutan pada kawasan hutan tingkat provinsi
    - Data dan informasi statistik kehutanan provinsi
    - Identifikasi perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan
  5. Tersedianya sarana dan prasarana pemetaan untuk mendukung kelancaran kegiatan penatausahaan kawasan hutan provinsi, dengan indikator:
    - Teroperasinya peralatan GIS untuk penyediaan data dan peta kehutanan
  6. Terwujudnya penggunaan KH sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku, dengan indikator sebagai berikut:
    - Rekomendasi ijin pinjam pakai KH terlayani 100% secara tepat waktu
    - Monev penggunaan KH
    - Data dan informasi penggunaan KH
  7. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
    - Penanganan tindak pidana kehutanan; kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan meningkat
  8. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan indikator sebagai berikut:
    - Kasus kebakaran hutan dan lahan terkendali
  9. Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal, dengan indikator sebagai berikut:

- Terkelolanya kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung
  - Database flora dan fauna, habitatnya serta peningkatan kegiatan konservasi, jasa lingkungan dan wisata alam
10. Mendukung terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan, dengan indikator sebagai berikut:
    - Luas lahan kritis menurun sebanyak 10% dari data awal 112.000 hektar
  11. Terlaksananya pengelolaan DAS berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut:
    - Pemulihan daya dukung DAS & peningkatan produktivitas lahan
  12. Mendukung terlaksananya upaya reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan, dengan indikator:
    - Realisasi reklamasi dalam kawasan hutan meningkat
  13. Terlatihnya masyarakat sekitar hutan dalam pengembangan HHBK, dengan indikator sebagai berikut:
    - Masyarakat terlatih dalam pemanfaatan HHBK
  14. Terpromosinya/dikenalnya produk-produk unggul dari kehutanan, dengan indikator sebagai berikut:
    - Dikenalnya produk-produk unggulan hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Prov. Kep. Bangka Belitung
  15. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTR dan HTI, dengan indikator sebagai berikut:
    - Terkendalinya pembangunan HTR dan HTI
  16. Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan, dengan indikator sebagai berikut:
    - Meningkatnya PNBK
  17. Tersosialisasinya pengelolaan KPHP, dengan indikator sebagai berikut:
    - Terkendalinya pengelolaan KPHP
  18. Terbangunnya hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta peningkatan usaha kehutanan, dengan indikator sebagai berikut:
    - Bertambahnya luas hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta tumbuh dan berkembangnya perekonomian.

### **2.2.3 Kebijakan Pembangunan**

Kebijakan pembangunan merupakan upayayang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan melaluiprogram dan kegiatan yang berkesinambungan.

Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
  - a. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi
  - b. Pengembangan hutan tanaman
  - c. Pengembangan hasil hutan non kayu
  - d. Optimalisasi PNPB
  - e. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - a. Pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan
  - b. Peringatan Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional
  - c. Pembangunan dan Pengelolaan sumber benih tanaman hutan
  - d. Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
  - e. Dukungan penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu
  - f. Fasilitasi forum DAS
  - g. Fasilitasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah
  - h. Monev pelaksanaan reklamasi bekas tambang
  - i. Dukungan penilaian reklamasi bekas tambang
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
  - a. Kegiatan Patroli dan pengamanan hutan
  - b. Perlindungan dan pengamanan hutan bersama masyarakat
  - c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan dan lingkungan
  - d. Sosialisasi pencegahan dan tampak kebakaran hutan dan lahan
  - e. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  - f. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
  - g. Dukungan kajian penetapan bentuk kawasan hutan konservasi
  - h. Penyusunan data base kawasan HL dan HK
  - i. Dukungan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
  - j. Dukungan penyusunan rencana pengelolaan HK dan HL sesuai bentuk kelola

- k. Penyusunan data dan informasi flora dan fauna tertentu beserta habitatnya
- l. Pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam (flora/fauna/kawasan), jasa lingkungan dan wisata alam
- 4. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
  - a. Pengembangan hutan masyarakat adat
  - b. Pendampingan kelompok usaha perhutanan
- 5. Program Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan hutan
  - a. Pengukuhan Kawasan Hutan
  - b. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
  - c. Perencanaan, Pemanfaatan, serta Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi
  - d. Inventarisasi dan Pemantauan SDH
  - e. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional SIG/GIS
  - f. Penyusunan basis data realisasi ijin pinjam pakai KH provinsi
  - g. Pelatihan GIS bagi aparatur kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2016

Dalam rencana kinerja tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1 Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja program dan kegiatan.

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksana promosi produk – produk unggul dari kehutanan	Tercapainya peningkatan promosi produk – produk unggulan hasil kayu dan bukan kayu	14,28%	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	Input : - Dana Output : - Promosi produk HHK dan HHBK Outcome : - Meningkatnya pemasaran hasil hutan	Rp. (jt) kab %	384.688.650 6 20	
Terkendalinya pemangunan HTI dan HTR Prov. Kep. Bangka Belitung	Tercapainya peningkatan pemanfaatan hutan dan tertibnya peredaran hasil hutan	14,28%		Sosialisasi Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Peredaran Hasil Hutan	Input : - Dana Output : - Sosialisasi pembinaan HTR, HTI dan Peredaran Hasil Hutan Outcome : - Pemahaman Masyarakat dan pelaku usaha	Rp. (jt) Orang Orang	161.200.000 180 180	



Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dalam pemanfaatan hutan dan peredaran hasil hutan			
Tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan	Tercapainya penguatan pembangunan HTR dan tercapainya peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan	14,28%		Bimtek Teknis dan Penguatan HTR dan Penatausahaan Hasil Hutan	Input : - Dana Output : - Terlatihnya Pendamping HTR dan pemegang IUPHHK-HTR Outcome : - Kualitas petugas dan penatausahaan hasil hutan dan PNPB	Rp. (jt)  Orang  Orang	245.550.000  80  80	
Meningkatnya pemanfaatan HTR	Tercapainya Penguatan Pembangunan HTR	14,28%		Observasi lapangan pembangunan HTR	Input : - Dana Output : - Observasi HTR Outcome : - Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dan petugas tentang HTR	Rp. (jt)  kali  Orang	121.351.000  1  20	
Meningkatnya kualitas Pemanfaatan HTR	Tercapainya Peningkatan Pemanfaatan Program HTR	14.28%		Pembinaan HTR	Input : - Dana Output : - Terlaksananya program pembinaan HTR ke kelompok	Rp. (jt)  KTH	202.637.600  10	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pemegang IUPHHK - HTR Outcome : - Meningkatnya Pemahaman masyarakat dalam Pemanfaatan hutan melalui program HTR	Orang	250	
Meningkatnya pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Peningkatan kinerja melalui indentifikasi dan penyelesaian masalah IUPHHK -HTI	14.28%		Bedah kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Input : - Dana Output : - Teridentifikasi kendala dan masalah pembangunan HTI Outcome : - Meningkatnya Kinerja PHPL IUPHHK - HTI	Rp. (jt) IUPPHH K -HTI IUPPHH K -HTI	100.000.000 7 7	
Meningkatnya pemanfaatan Komoditi kehutanan	Berkembangnya komoditi kehutanan melalui hasil hutan non kayu	1 Prov		Pengembangan informasi komoditi kehutanan prioritas penyuluh kehutanan dan pelaku usaha melalui potensi sumber daya hutan bangka belitung	Input : - Dana Output : - Terbentuk suatu komoditi kehutanan bersama prioritas penyuluh kehutanan Outcome : - Meningkatnya komoditi dan koperasi kehutanan dari hasil hutan non kayu	Rp. (jt) Provinsi Provinsi	94.185.000 1 1	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya dan pemanfaatan KPHP	Pengoperasian kesatuan pemangku produksi (KPHP)	Prov	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Operasional KPHP dan sarana penunjang lainnya	Input : - Dana Output : - Meningkatnya kualitas pengelolaan KPHP  Outcome : - KPHP yang telah terbentuk dan meningkatnya tutupan lahan pada KPHP	Rp. (jt)  Kab.  KPHP	1.282.180  Bangka Barat dan Beltim  2	
Tersediaanya dokumen pemanfaatan pengelolaan ekosistem yang baik di Pulau Bangka	Jumlah dokumen pengelolaan pemanfaatan ekosistem mangrove	Prov		Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Input : - Dana Output : - Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Hutan  Outcome : - Meningkatnya tutupan lahan pembuatan silvofishery mangrove, rehabilitasi hutan dan lahan di kelompok HKM dan taman Arborentum di kawasan konservasi (tahura)	Rp. (jt)  Kab.  Hektar	1.328.000  Beltim dan Bateng  28	
Terselenggaranya	Terciptanya perlindungan	1 Prov	Program Perlindungan	Perlindungan dan	Input : - Dana	Rp. (jt)	210.500.000	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
perlindungan dan pengamanan hutan	dan konservasi sumber daya alam		dan Konservasi Sumber Daya Hutan	pengamanan hutan terpadu di Prov. Kep. Babel	Output : - Berkurangnya pelanggaran tindak pidana kehutanan Outcome : - Penanganan tindak pidana kehutanan di Prov.Kep. Babel	wilayah  1	Prov.Babel  Laporan	
Terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan	Teridentifikasi dan terfasilitasinya para penangkar tumbuhan dan satwa langka di Prov.Kep. Babel	1 Prov		Identifikasi sebaran Flora dan Fauna Langka (TSL) di Prov.Kep. Bangka Belitung	Input : - Dana Output : - Konservasi (perlindungan flora dan fauna langka) Outcome : - Tersedianya penangkar yang memiliki izin	Rp. (jt) Buku Prov	158.980.000 1 1	
Peningkatan pembinaan PAMHUT	Terlaksananya pembinaan dan koordinasi PAMHUT Swakarsa	1 Prov		Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov.Kep. Babel	Input : - Dana Output : - Terbangunnya Koordinasi yang baik Outcome : - Terlaksananya fasilitas PAMHUT Swakarsa Kabupaten	Rp. (jt) Kab Kab	384.630.000 6 6	
Terselenggaranya usaha perlindungan hutan	Jumlah peserta terlatih dalam pengendalian	6 Kab		Pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi	Input : - Dana Output : - Pertemuan	Rp. (jt)	213.846.000	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kebakaran hutan			peraturan bidang	pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan Outcome : - Terciptanya keamanan kawasan hutan	Kab	6	
						Kab.	6	
Terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan	Terciptanya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	1 Prov		Operasional Polisi Hutan (POLHUT)	Input : - Dana Output : - Terselenggaranya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan Outcome : - Berkurangnya tindak pidana kehutanan sehingga meningkatnya kegiatan perlindungan Hutan	Rp. (jt)	593.580.000	
						Kab	6	
						Kab	6	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan	Terlaksananya keberhasilan PKA Wana Lestari	1 Prov		Penilaian Lomba PKA Wana Lestari	Input : - Dana  Output : - Tersedianya penilaian lomba PKA Wana Lestari  Outcome : Terlaksananya keberhasilan PKA Wana Lestari	Rp. (jt)  Peserta  Peserta	82.801.800  Polhut & kader konservasi  Polhut & kader konservasi	
Peningkatan hutan dan konservasi sumber daya hutan	Terlaksananya perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam	6 Kab		Pembuatan pos jaga dan papan pengumuman di hutan produksi	Input : - Dana Output : - Terlaksananya pembuatan pos jaga dan terpasangnya papan pengumuman Outcome : - Terciptanya keamanan	Rp. (jt)  Kab  Kab	225.300.000  6  6	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan perlindungan Konservasi SDA bagi masyarakat	Terbangunnya pendampingan perlindungan dan konservasi SDA bagi masyarakat dan penyuluh kehutanan	1 Prov		Pendampingan penyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi	Input : - Dana Output : - Terbangunnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi DAS Outcome : - Tercapainya pengelolaan SDA dan perlindungan hutan bersama penyuluh kehutanan	Rp. (jt)  Prov  Kab	74.561.300  1  6	
Tersedianya dokumen pemanfaatan pengelolaan ekosistem Mangrove	Teridentifikasi potensi dan sebaran mangrove di Prov.Kep.Babel	Kab. Bangka Barat		Survei potensi dan sebaran Mangrove di Prov.Kep. Babel	Input : - Dana Output : - Tersusunnya buku laporan Mangrove Outcome : - Terlaksananya konservasi (perlindungan Mangrove)	Rp. (jt)  Buku  Kab.	196.059.000  1  Bangka Barat	
Terlaksananya Operasional GIS	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyediaan data dan	8.13%	Program perencanaan dan Pengembangan hutan	Operasional GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan	Input : - Dana Output : - Terlaksananya Operasional GIS dan alat operasi	Rp. (jt)  Wilayah	124.050.000  Prov. Kep. Babel	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	informasi batas kawasan hutan				pengukuran dan perpetaan Outcome : - Tersedianya peta dan Informasi kawasan hutan	wilayah	Prov. Kep. Babel	
Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan program/kegiatan tahunan Prov.Kep. Babel	Tersusun Dokumen Perencanaan Tahunan	1 Dinas		Rapat KoordinasiPerencanaan Pembangunan Kehutanan	Input : - Dana Output : - Dokumen Renja SKPD Outcome : - Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan	Rp. (jt) Prov. Prov.	110.000.000  1 1	
Terselenggaranya upaya penertiban izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan Prov. Kep. Bangka Belitung	Tersedianya dukungan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan hutan	8.30%		Monitoring dan Evaluasi Penggunaan kawasn hutan	Input : - Dana Output : - Terlaksananya Monev terhadap pemegang IPPKH Outcome : - Terwujudnya pengendalian terhadap pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan	Rp. (jt) Perusahaan IPPKH Buku Laporan Monev	249.704.000  6 1	



Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya Rekonsiliasasi pembangunan Kehutanan	Terlaksananya Rekonsiliasasi data dan informasi pembangunan Kehutanan	100%		Rekonsiliasasi dan informasi pembangunan kehutanan se-Prov.Kep.Babel	Input : - Dana Output : - Meningkatnya PDB dari bidang kehutanan Sinkronisasi data dan informasi pembangunan Kehutanan Outcome : - Tersedianya data base pembangunan kehutanan se – Prov.kep. Babel	Rp. (jt)  Kab/kota  %	381.210.250  7  100	
Terselenggaranya Sosialisasi Pemenuhan Kewajiban bagi IPPKH	Optimalisasi Penggunaan Kawasan Hutan	8.30%		Sosialisasi pemenuhan kewajiban bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan	Input : - Dana Output : - Terlaksananya Sosialisasi terhadap Pemegang IPPKH dan aparaturnya kehutanan Outcome : - Terwujudnya pemenuhan dalam rangka pengendalian PKH	Rp. (jt)  Peserta  Peserta	96.732.000  40  40	
Terselenggaranya Konsultasi Publik	Terwujudnya dukungan pengelolaan kawasan	8.30%		Konsultasi publik rencana pengelolaan dan tata hutan	Input : - Dana Output : - Terlaksananya	Rp. (jt)  Peserta	263.900.750  80 (2 KPH)	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rencana Pengelolaan dan Tata Hutan Kesatuan	hutan di tingkat tapak			kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model	Sosialisasi rencana pengelolaan dan tata hutan kesatuan pengelolaan huta (KPH) model Outcome : - Tersampainya informasi rencana pengeloaan dan tata hutan KPH	Peserta	80 (2 KPH)	
Terselenggaranya upaya penyediaan informasi sumber daya hutan pada kawasan hutan tingkat Provinsi	Terinventarisasi dan terpantaunya perkembangan pemanfaatan sumber daya Hutan	8.30%		Sosialisasi neraca sumber daya hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola Hutan	Input : - Dana Output : - Tersusunnya buku tentang NSDA Outcome : - Tersedianya dan terinfomasikannya data sumber daya hutan	Rp. (jt)  Dokumen NSDH/ peserta  Dokumen NSDH/ Peserta	27.579.000  40  40	
Terselenggaranya pelaksanaan Oreintasi Batas kawasan hutan	Tercapainya Pemantapan Kawasan Hutan	8.30%		Pemantapan Kawasan Hutan	Input : - Dana Output : - Terlaksananya kegiatan orientasi dan inventarisasi batas dan terlaksananya	Rp. (jt)  Km Trayek/ Peserta	161.730.000  90/40	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					sosialisasi IP4T Outcome : - Tersedianya data kondisi batas lapangan kawasan terhadap aspek yang terkait dengan IP4T	Km Trayek/Orang	90/40	
Terselenggaranya pembentukan kelembagaan FGD KPH di Prov. Kep. Babel	Tercapainya pemahaman Perencanaan dan Pengembangan hutan	8.30%		Penyiapan penyusunan kelembagaan dan FGD KPH di Prov. Kep. Babel	Input : - Dana Output : - Tercapainya fasilitasi penyusunan kelembagaan KPH di Provinsi Outcome : - Optimalisasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak	Rp. (jt)  Dokumen  Dokumen	121.850.000  Konsep revisi Pergub dan peserta FGD  Konsep revisi Pergub dan peserta FGD	
Terselenggaranya sinkronisasi RKTP	Terwujudnya Sinkronisasi RKTP dengan RKTN	8.30%		Revisi rencana kehutanan tingkat Provinsi	Input : - Dana Output : - Terlaksananya revisi RKTP Outcome : - Dokumen revisi RKTP	Rp. (jt)  Dokumen RKTP  Dokumen RKTP	108.590.000  1  1	
Terselenggaranya koordinasi perencanaan pemantapan	Terwujudnya perencanaan pemantapan ruang	8.30%		Koordinasi dan perencanaan pemantapan ruang dalam	Input : - Dana Output : - Terlaksananya	Rp. (jt)  Kab	69.400.000  4	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ruang dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi	(substansi kehutanan dalam RTRWP)			rencana tata ruang wilayah provinsi	Koordinasi perencanaan pemantapan ruang (substansi kehutanan RTRWP) Outcome : - Tersedianya data dan informasi pemanfaatan ruang (substansi kehutanan)	(pulau bangka)  Laporan	1	
Terselenggaranya upaya Monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan kehutanan Provinsi Babel	6 Kab/kota		Monitoring dan Evaluasi pembangunan kehutanan Prov.Kep. Babel	Input : - Dana Output : - Laporan tentang Monev pelaksanaan pembangunan kehutanan Prov.Babel  Outcome : - Terwujudnya evaluasi terhadap pembangunan kehutanan Prov.Babel	Rp. (jt)  Keg.pembangunan kehutanan Prov. Babel  Keg.pembangunan kehutanan Prov.Babel	158.740.000	
Terselenggaranya upaya kemitraan	Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui	Prov		Pengembangan hutan rakyat	Input : - Dana Output :	Rp. (jt)	543.000.000	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
masyarakat di luar kawasan hutan	kegiatan kemitraan masyarakat di luar kawasan hutan				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas pengelolaan hutan rakyat</li> </ul> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas tutupan lahan melalui areal model pengembangan HTR, tanaman sebagai lurus jalan dan taman arboretum di luar kawasan hutan</li> </ul>	<p>Kab</p> <p>Hektar</p>	<p>Beltim, Basel, Bateng, Belitung, Bangka dan Babar</p> <p>22</p>	
Penanaman Satu Milyar Pohon di Prov.Kep. Babel	Terlaksananya penanaman pohon dalam mendukung rehabilitasi hutan dan lahan				<p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dana</li> </ul> <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya jumlah penghijauan/penanaman yang telah dilakukan di Provinsi</li> </ul> <p>Outcome :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwujudnya evaluasi terhadap pembangunan kehutanan Prov.Babel</li> </ul>	<p>Pohon</p> <p>Pohon</p>	<p>299.155.000</p> <p>10 Juta</p> <p>10 Juta</p>	

## 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, rencana kinerja tahunan tahun 2016 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disepakati antara kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Daerah Tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
TAHUN	:	2016		
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1.	Menurunnya luas lahan kritis sebanyak 30% dari data awal 112.000 hektar sampai tahun 2017	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	6	%
2.	Terselenggaranya perlindungan, pengamanan hutan	Penyelesaian tindak pidana hutan	15	%
		Penanganan kebakaran hutan	20	%
3.	Meningkatnya konservasi sumber daya alam	Jumlah satus pengelolaan kawasan hutan konservasi	6	Kawasan
4.	Meningkatnya pengelolaan hutan produksi lestari	Tumbuhan satwa liar	1	Dokumen
		Jumlah KPH yang terbentuk	2	Unit
		Luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman :		
		- Kemasyarakatan (HK)	2000	Hektar
		- Hutan Desa (HD)	700	Hektar
- Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	50	Hektar		
		Penetapan luas IUPHHK-HTI	244.330	Hektar
		Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	330.000.000	Rp
5.	Terselenggaranya harmonisasi perencanaan tata ruang dalam mendukung pemantapan kawasan hutan	Orientasi batas kawasan hutan	75	Km
		Rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan	100	%
		Hutan lingkup Provinsi Kep. Bangka Belitung	1	Dokumen

6.		Jumlah bulan ketersediaan layanan administrasi	12	bulan
----	--	--	----	-------

Rekapitulasi Program dan Pagu Anggaran Tahun 2016

1.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp.	1.606.575.000
2.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rp.	2.610.180.000
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	Rp.	2.699.950.000
4.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Rp.	3.218.240.750
5.	Program Peningkatan Fungsi dan daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	1.665.465.000
	<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>11.800.410.750</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran;
2. Analisis dan Evaluasi Kinerja;
3. Akuntabilitas Keuangan.

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

#### **3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran**

Pengukuran capaian sasaran kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Hingga akhir tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:



**Tujuan 1** : Meningkatnya pelayanan publik dengan menyediakan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Presentase peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan	5%	5%	100	100
	Jumlah luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman	200 Hektar	200 hektar	100	100

**Tujuan 2** : Mewujudkan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peraturan yang berlaku.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku	Rekomendasi ijin pinjam kawasan terlayani	100 %	100 %	100	100
	Monev penggunaan kawasan hutan	8.30%	8.30%	100	100

**Tujuan 3** : Mendukung terciptanya perlindungan dan pengamanan hutan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran kedua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat	Penanganan tindak pidana kehutanan, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan meningkat	60%	60%	100	100
2. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kasus kebakaran hutan dan lahan menurun dan terkendali	7 Kab	7 Kab	100	100

**Tujuan 4** : Mengembangkan upaya konservasi hutan, SDA dan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk wisata alam.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal	1. Terkelolanya kawasan hutan konservasi dan hutan lindung	7 Kab	7 Kab	100	100
	2. Database flora dan fauna, habitatnya	7 Kab	7 Kab	100	100

**Tujuan 5** : Penurunan luas lahan kritis dan peningkatan daya dukung DAS.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ketiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Terselenggaranya upaya rehabilitasi hutan dan lahan	1. Luas lahan kritis menurun sebanyak 30% dari data awal 112.000 hektar	10% lahan	10% lahan	100	100
	2. Pemulihan DAS dan peningkatan produktivitas lahan	50% lahan DAS	50% lahan DAS	100	100

**Tujuan 6** : Meningkatkan pemberdayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Meningkatnya pemberdayaan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	1. Terlaksananya promosi produk – produk hasil hutan	6 Kab	6 Kab	100	100
	2. Dikenalnya produk – produk unggulan hasil hutan kayu dan non kayu	25%	25%	100	100

**Tujuan 7** : Mempromosikan berbagai produk unggul dari kehutanan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Terpromosinya produk – produk unggul dari kehutanan	1. Peningkatan pemasaran hasil hutan	20%	20%	100	100

**Tujuan 8** : Meningkatkan pengembangan kawasan hutan produksi melalui pembangunan HTR dan HTI.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTR dan HTI	1. terlaksananya sosialisasi HTI dan peredaran hasil hutan 2. Peningkatam penggunaan hutan produksi (HTI dan HTR)	180 Orang 25%	180 Orang 25%	100 100	100 100

**Tujuan 9** : Meningkatkan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Meningkatnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan PNPB	5%	5%	100	100

**Tujuan 10** : Pembangunan hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 1 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase (%)</b>	<b>% capaian tahun sebelumnya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terbangunnya hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta peningkatan usaha kehutanan	Bertambahnya luas hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta tumbuh dan berkembangnya perekonomian	1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan	1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan	100	100

### 3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja

#### a. Sasaran-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase (%)</b>	<b>% capaian tahun sebelumnya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Presentase peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan	5%	5%	100	100
	Jumlah luas areal pencadangan izin pemanfaatan hutan tanaman	200 Hektar	200 hektar	100	100
Rata - rata capaian sasaran-1				100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

b.Sasaran -2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi peruntukan dan peraturan yang berlaku	Rekomendasi ijin pinjam kawasan terlayani	100 %	100 %	100	
	Monev penggunaan kawasan hutan	8.30%	8.30%	100	100
Rata - rata capaian sasaran-2				100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

b. Sasaran-3 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Terselenggaranya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal bersama partisipasi masyarakat	Penanganan tindak pidana kehutanan, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan meningkat	60%	60%	100	100
2. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kasus kebakaran hutan dan lahan menurun dan terkendali	7 Kab	7 Kab	100	100
Rata - rata capaian sasaran-3				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-3, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

c. Sasaran-4 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-2, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase (%)</b>	<b>% capaian tahun sebelumnya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2. Terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kasus kebakaran hutan dan lahan menurun dan terkendali	20 %	20 %	100	100
Rata – rata capaian sasaran-4				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-4, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-4 diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat petani/kebun terhadap bahaya kebakaran hutan;
2. Terbatasnya sumber daya manusia kehutanan sebagai pemantau hotspot (titik rawan) kebakaran hutan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan;
2. Pelatihan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan;
2. Pelatihan tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Pemanfaatan alat dekteksi kebakaran hutan;
4. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan.

d. Sasaran 5 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase (%)</b>	<b>% capaian tahun sebelumnya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. terwujudnya pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan/kawasan lindung secara optimal	1. Terkelolanya kawasan hutan konservasi dan hutal lindung	7 Kab	7 Kab	100	100
	2. Database flora dan fauna, habitatnya	7 Kab	7 Kab	100	100
Rata - rata capaian sasaran-5				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-5, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2016, pada sasaran-5 telah sesuai dari target yang telah ditetapkan.

e. Sasaran-6 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Meningkatnya pemberdayaan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	1. Terlaksananya promosi produk - produk hasil hutan 2. dikenalnya produk - produk unggulan hasil hutan kayu dan non kayu	6 Kab  25%	6 Kab  25%	100  100	100
Rata - rata capaian sasaran-6				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, dari 3 indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-6 diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan;
2. Maraknya illegal logging dan illegal farming.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bibit tanaman pohon untuk perubahan iklim dan bimtek penanaman secara organik untuk rehabilitasi hutan dan lahan;
2. Melakukan penyuluhan sistem penanaman kembali (reboisasi);
3. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam pohon (One Billion One Tree);
4. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam 1 milyar pohon.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan;
2. Melakukan penyuluhan sistem penanaman kembali (reboisasi);
3. Pemberian bibit tanaman pohon untuk perubahan iklim dan bimtek penanaman secara organik untuk rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam satu milyar pohon (One Billion Tree);

5. Melaksanakan dan menggalakkan program menanam 1 milyar pohon;
  6. Melaksanakan pemeliharaan pada pohon yang ditanam;
  7. Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan.
- Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2015, pada sasaran-6 telah mencapai 17%. Hal ini berarti terhadap capaian sasaran-6 melebihi dari target yang telah ditetapkan.

f. Sasaran 7 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-6, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosentase (%)</b>	<b>% capaian tahun sebelumnya</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Terpromosinya produk – produk unggul dari kehutanan	1. Peningkatan pemasaran hasil hutan	20%	20%	100	100
Rata – rata capaian sasaran-7				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-7, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-7 diantaranya adalah :

1. Kurangnya munculnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan;

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
2. Melaksanakan pelatihan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
2. Melaksanakan pelatihan dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3. Mendorong peningkatan dan pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2015, pada sasaran-7 telah sesuai dari target yang telah ditetapkan.

g. Sasaran-8 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Tersosialisasinya kebijakan pembangunan HTR dan HTI	1. terlaksananya sosialisasi HTI dan peredaran hasil hutan 2. Peningkatam penggunaan hutan produksi (HTI dan HTR)	180 Orang  25%	180 Orang  25%	100  100	
Rata – rata capaian sasaran-8				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-8, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran-8 diantaranya adalah :

1. Adanya penolakan dari masyarakat untuk pemanfaatan hutan menjadi HTI dan HTR hal ini dikarenakan belum mengertinya masyarakat terhadap manfaat HTI dan HTR;

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap konsep pembangunan hutan HTI dan HTR;

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap konsep pembangunan hutan HTI dan HTR;
2. Melaksanakan identifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hutan untuk HTI dan HTR.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2016, Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pameran / expo produk hasil hutan bukan kayu;
2. Mendorong dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pemasaran produk hasil hutan bukan kayu;
3. Memberikan pelatihan tata cara kemasan yang menarik dari produk hasil hutan bukan kayu.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 – 2017 sampai pada tahun 2016, capaian sasaran-8 sesuai dari target yang telah ditetapkan.

h. Sasaran-9 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Meningkatnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan PNPB	5%	5%	100	100
Rata – rata capaian sasaran-9				100 %	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-9, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

J. Sasaran-10 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-10, indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase (%)	% capaian tahun sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terbangunnya hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta peningkatan usaha kehutanan	Bertambahnya luas hutan adat, hutan rakyat dan perhutanan sosial serta tumbuh dan berkembangnya perekonomian	1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan	1 lokasi hutan adat, 1 lokasi hutan rakyat, 1 lokasi perhutanan sosial, 1 kelompok usaha kehutanan	100	100
Rata - rata capaian sasaran-10					100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-10, dari indikator kinerja sebagai tolak ukur tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara singkat sasaran di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

- A. **Sasaran-1** yaitu tersedianya data dan informasi potensi sumber daya hutan lingkup Provinsi, dengan dilakukan pengumpulan data statistik kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- B. **Sasaran-2** yaitu terselenggaranya penatagunaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan menetapkan rekomendasi ijin pinjam pakai kawasan hutan (KH) terlayani 100% secara tepat waktu, dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penggunaan kawasan hutan (KH) dengan data dan informasi penggunaan kawasan hutan (KH);
- C. **Sasaran-3** yaitu terselenggaranya upaya – upaya perlindungan dan pengamanan hutan secara optimal serta terwujudnya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan/lahan, diadakannya Patroli rutin, pulbaket dan penindakan terhadap 15% tipihut yang ditemukan, peningkatan upaya preventif di 6 Kabupaten/Kota, akan tercapai tujuan secara optimal yaitu: menurunnya tindak pidana kehutanan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan;
- D. **Sasaran-5** yaitu terkumpulnya data potensi ekowisata dan jasa lingkungan yang potensial dikembangkan untuk mendukung pariwisata sektor kehutanan dan terjalinnya kerjasama usaha

pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan, terhimpunnya Database flora fauna dan habitatnya serta peningkatan kegiatan konservasi, jasa lingkungan dan wisata alam dengan melakukan proses penyusunan database flora, fauna tertentu dan habitatnya di 6 Kabupaten, mendorong kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam di 7 kabupaten/Kota;

- E. **Sasaran-6** yaitu optimalnya pendapatan negara bukan pajak dan terciptanya tertib administrasi peredaran hasil hutan melalui pengumpulan data potensi dan pilihan pengembangan serta pemasaran hasil hutan bukan kayu, dengan tertibnya administrasi peredaran dan iuran hasil hutan dan peningkatan iuran Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 341,5 %;
- F. **Sasaran-7** yaitu terlaksananya pengembangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, dengan terbentuknya 1 hutan adat, 1 hutan rakyat, dan 1 kelompok tani hutan;

### **3.3. Akuntabilitas Keuangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun anggaran 2016, yaitu :

#### **a. Target Pendapatan**

Pada tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp.18.949.279.071,-, namun sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik yang dapat dicapai sebesar 96,815 dengan realisasi anggaran/keuangan yang dicapai adalah 93,00%.

#### **b. Pelaksanaan APBD Tahun 2016**

Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan Anggaran sebesar Rp.18.949.279.071,-, namun sampai dengan Triwulan IV realisasi fisik yang dapat dicapai sebesar 96,815 dengan realisasi anggaran/keuangan yang dicapai adalah 93,00%.

Anggaran sejumlah Rp.18.949.279.071,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp. 7.197.733.521,- dan belanja langsung sebanyak Rp. 11.751.545.550,-.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diupayakan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kegiatan dan Pengukuran Kinerja.

Dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam tahun 2016. Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan indikator capaian kinerja secara totalitas, namun setidaknya masyarakat dan *stakeholder* dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 pada SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang,

Sekian dan terima kasih.

Pangkalpinang, Februari 2016

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung

**Ir. Nazalyus, M. Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19590824 198603 1 009

